

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dengan berjalannya waktu, fakta mengenai pelaporan keuangan yang ada di Indonesia menjadi salah satu hal yang menarik untuk diteliti, karena masih terdapat kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah elemen yang penting untuk pemerintah yang wajib diperhatikan dalam menyajikan laporan keuangan dan sebagai media untuk pemerintah supaya mempertanggungjawabkan kinerja keuangan kepada publik. Instansi Pemerintah Daerah sebagai pengelola dana publik harus dapat menyajikan informasi keuangan secara transparan dan akuntabel (Aditya & surjono, 2017).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdapat karakteristik kualitatif dalam laporan keuangan yang terdiri dari : relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkannya. Apabila ada suatu laporan keuangan yang sudah memenuhi karakteristik kualitatif tersebut, maka akan mendapatkan hasil laporan keuangan yang berkualitas. Oleh karena itu, laporan keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pemerintah, dikarenakan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006, Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan negara atau daerah selama suatu periode.

Apabila suatu informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah harus mempertahankan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Laporan keuangan bersumber pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ialah media yang di pakai oleh entitas

terkhusus pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangan kepada pihak yang berkepentingan (publik).

Dewasa ini tuntutan masyarakat semakin meningkat atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*). Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*) telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas mendorong pemerintah untuk meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terjadi perubahan sebutan atau istilah, seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berubah menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)). Laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu kegiatan pemerintahan telah berjalan dengan baik, maka dari itu pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Wati *et al.*, 2014). Sehingga dari publikasi laporan keuangan tersebut dapat berguna bagi pihak yang berkepentingan dan menjadi dasar pengambilan keputusan. Laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan media yang di gunakan oleh entitas terkhusus pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kinerja keuangan kepada pihak yang berkepentingan (publik). Dari perspektif rakyat di daerah, laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun sesuai dengan SAP dapat menjelaskan bagaimana pemerintah mengelola keuangan dalam melaksanakan pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Standar tersebut dikukuhkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan gabungan dari laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pemerintah

daerah selama satu periode pelaporan. LKPD digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pemerintah daerah (Erlina dan Rasdianto, 2013).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilaporkan satu tahun sekali dan akan mendapat opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), Tidak Memberi Pendapat (TMP). Laporan keuangan pemerintah yang belum memenuhi standar akuntansi dan masih ditemukannya penyimpangan-penyimpangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik semakin meningkat. Laporan keuangan yang baik dapat dihasilkan dengan kompetensi sumber daya manusia yang baik, pemanfaatan sistem informasi yang baik, pengendalian internal yang baik dan juga pemahaman akuntansi yang baik.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Lampung dinyatakan bahwa Provinsi Lampung berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2014-2019. Hasil ini tentunya sangat membanggakan, sebab Provinsi Lampung selama 5 tahun berturut-turut berhasil memperoleh predikat opini WTP. Seiring banyaknya penyimpangan terhadap laporan keuangan pemerintah yang belum baik fenomena peningkatan opini laporan keuangan pemerintah daerah dari Wajar Dengan Pengecualian menjadi Wajar Tanpa Pengecualian terjadi di beberapa LKPD di provinsi Lampung. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengaudit atas LKPD Kabupaten Pesawaran selama enam tahun, dari tahun 2014-2019, BPK memberikan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebagaimana tersaji dalam tabel 1.1

Tabel 1.1
Opini LKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2014-2019

| LKPD (Tahun) | Opini |
|--------------|-------|
| 2014 | WDP |
| 2015 | WDP |
| 2016 | WTP |
| 2017 | WTP |
| 2018 | WTP |

Sumber : <https://lampung.bpk.go.id/>

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengungkapkan pengawasan internal di pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota di Lampung oleh inspektorat masing-masing, dirasakan masih sangat lemah. Akibatnya, banyak penyimpangan dalam pengelolaan anggaran yang lolos begitu saja. Contohnya dalam kasus pengadaan barang dan jasa di Provinsi Lampung. Banyak yang menjadi temuan kemahalan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), tetapi hal itu tidak menjadi temuan dan atensi pencegahan inspektorat. BPK juga mengkritisi lemahnya pengawasan internal oleh jajaran inspektorat di Lampung. Padahal, inspektorat berperan penting dalam mengawasi dan mencegah penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan APBD. (<https://www.saibumi.com/artikel-117771-6-temuan-bpk-soal-laporan-keuangan-provinsi-lampung-kejati-lampung-diminta-selidiki.html>).

Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung telah melaksanakan pemeriksaan entrim I dan entrim II terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2019. Dalam pemeriksaan tersebut, Pesawaran meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK. Namun, opini wajar tanpa pengecualian yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan tersebut bukan berarti bebas dari kesalahan dan kelemahan. BPK perwakilan Lampung menemukan beberapa permasalahan yakni dalam pencatatan dan pelaporan asset yang belum jelas, pendapatan restribusi daerah, pendapatan atas sewa belum diatur, penerimaan daerah, penatausahaan aset tetap, realisasi belanja dan BPK juga menekankan agar perangkat daerah melaksanakan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku serta melaksanakan sistem pengendalian internal.

Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

Empat karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*) (Erlina dan Rasdianto, 2013).

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, adanya sistem akuntansi keuangan daerah diharapkan pemerintah daerah dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah daerah mampu menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Disisi lain dengan adanya sistem akuntansi keuangan daerah tersebut, pengelolaan keuangan daerah dapat lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Selain itu kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan dan kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan SAP sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta mencegah terjadinya kerugian negara (Hasyim, 2017). Standar akuntansi pemerintahan memiliki kontribusi yang kuat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, terutama dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dihasilkan.

Faktor kedua yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan yaitu penggunaan sistem informasi akuntansi pada instansi pemerintahan yang juga mempunyai peran penting demi kualitas laporan keuangan yang baik. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan penerapan sistem mulai dari pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah ke dalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu sistem informasi yang nantinya dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan oleh masing-masing OPD dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (Hasyim, 2017).

Faktor ketiga yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan adalah pengendalian *internal*. sistem pengendalian internal dalam akuntansi mempunyai peranan yang penting, karena sistem pengendalian internal adalah suatu prosedur atau sistem yang dirancang untuk mengontrol, mengawasi dan mengarahkan organisasi agar bisa mencapai suatu tujuan. Selain itu, sistem pengendalian internal ini juga bisa dipergunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan, membantu menyajikan informasi akuntansi yang handal

untuk laporan keuangan dan menjamin dipatuhinya hukum serta peraturan yang berlaku (Anggraini, 2017). Dengan melakukan penerapan sistem pengendalian *intern* mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi dan memudahkan proses audit laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan yang baik dapat dilihat dari seberapa baiknya pengendalian internal yang telah diterapkan.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh (Lestari & Dewi 2020) yang berjudul Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kualitas laporan keuangan. Persamaan dengan penelitian ini sama – sama membahas tentang Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Badung, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berlokasi di Kabupaten Pesawaran.

Banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang di publikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat memenuhi criteria karakteristik kualitatif laporan keuangannya seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidak hematatan, ketidakefisienan, dan ketidak efektifan. Fakta dan fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia menjadi sesuatu hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan SKPD Kabupaten Pesawaran.

Pemilihan objek penelitian ini juga dengan pertimbangan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran bahwa BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah kabupaten Pesawaran. Dalam laporan keuangan tersebut masih terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian internal yaitu perihal penataan asset yang dinilai masih kurang memadai. Dalam hal pengelolaan keuangan masih terdapat hal yang dinilai masih kurang memadai. Dalam hal pengelolaan keuangan masih terdapat hal yang dinilai kurang patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan teori dan uraian di atas dan didukung dengan fakta-fakta yang ada, maka penulis ingin meneliti tentang “Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pesawaran”.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yaitu dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) variabel bebas yaitu Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Pengendalian Internal, variabel terikat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran?
2. Apakah Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran?
3. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Untuk membuktikan secara empiris Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Untuk membuktikan secara empiris Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan urain diatas, maka manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan penulis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dan memahami perbandingan antara konsep yang diberikan pada masa perkuliahan dengan penerapannya langsung di instansi pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademik

Bagi dunia pendidikan, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan data empiris bagi pembangunan ilmu pengetahuan. Dan sebagai informasi bagi rekan-rekan mahasiswa dalam mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai standar akuntansi pemerintahan.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Pengetahuan dan wawasan mengenai pengelolaan keuangan daerah dan Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dalam mengambil kebijaksanaan untuk terus meningkatkan dan mengembangkan daerahnya di masa yang akan datang. Dimana faktor penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pegawai dalam penyusunan laporan keuangan daerah sehingga tingkat kualitas dari laporan keuangan

daerah.

c. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan serta menjadi sumber informasi atau masukan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang landasan teori yang merupakan penjabaran dari kerangka yang berkaitan dengan variabel terikat yaitu Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat deskripsi objek penelitian, hasil analisis dan perhitungan statistik, serta pembahasan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijelaskan. Selain itu disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN